



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN BERBASIS DARING DI SMP MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA

Dian Hidayati, Arief Kurniawan, Susamta, Beny Setyawan*

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Correspondence: *E-mail: dian.hidayati@mp.uad.ac.id

ABSTRACTS

This study aims to describe and provide advice on the implementation of online-based learning policies at 2 Muhammadiyah Junior High Schools in Yogyakarta City. The research method used is qualitative, which was conducted by observation, interviews, documentation, and data triangulation. The result of the study is that the implementation of educational policies carried out by SMP Muhammadiyah is going well by preparing and carrying out the learning process by planning, organizing, and evaluating all activities carried out. The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia issued a Circular on the Implementation of Education Policy in the Emergency Period of the Spread of Coronavirus Disease (COVID-19) concerning the learning process from home which is carried out with the following provisions: (a) Learning from home provide a meaningful learning experience for students, without being burdened with completing the curriculum for grade promotion or graduation; (b) Learning from home can get education in life education; (c) activities and tasks according to their respective interests and conditions, including considering access/facilities for studying at home; (d) Evidence or products of learning activities from home are given qualitative and useful feedback from the teacher, without being required to provide a quantitative score/value.

Keyword: Education Policy, Online Learning, Policy implementation.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 19 Aug 2021

First Revised 03 Sep 2021

Accepted 03 May 2022

First Available online 09 May 2022

Publication Date 01 Oct 2022

1. PENDAHULUAN

Virus corona-19 atau COVID-19 terdefiniskan sebagai penyakit menular tahun 2020 merupakan tahun tantangan dikarenakan adanya sindrom pernapasan untuk negara di seluruh dunia. Penyebabnya virus corona-2 (*server acute respiratory adalah wabah virus corona-19 dengan cepat syndrome coronavirus-2 atau SARSCoV-2*) melanda kawasan-kawasan di penjuru dunia. Wabah virus corona-19 mengakibatkan dampak sangat serius dalam bidang kesehatan dan merambah pada berbagai bidang lainnya seperti sosial, ekonomi, bahkan pendidikan (Hanafi et al., 2021). Tercatat 215 negara di dunia telah terdampak wabah COVID-19, serta memberi dampak terhadap jalannya pembelajaran di instansi pendidikan, khususnya tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, hingga Perguruan Tinggi merespon dampak pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran (Perpu No 1 Tahun 2020) yang berisi larangan bagi perguruan tinggi melakukan perkuliahan secara tatap muka atau luring (luar jaringan) dan memerintahkan perkuliahan diselenggarakan secara daring (dalam jaringan).

Perguruan tinggi dituntut mampu melaksanakan perkuliahan secara daring untuk menghindari pelaksanaan perkuliahan secara tatap muka (Firman, 2020). Pemerintah menindak lanjuti dengan berbagai kebijakan serta inisiatif guna menjawab tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, diantaranya untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran dimasa pandemi dengan merevisi surat keputusan bersama (SKB) Empat Menteri yang telah diterbitkan pada 7 Agustus 2020. Sekolah juga diberi keluwesan dalam mengatur jalannya pembelajaran sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat, (Kurniaman dan Noviana, 2017; Nurdin dan Samad, 2018).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) bahwa proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan: (a) belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, (b) belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19; (c) aktifitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah, dan (d) bukti produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif (Pabbajah et al., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan saran terhadap penerapan kebijakan pembelajaran berbasis daring pada SMP Muhammadiyah Yogyakarta.

2. METODE PENELITIAN

Metoda peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Secara detail, penelitian ini terdiri dari tahapan sebagai berikut: melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Secara detail, penelitian ini terdiri dari tahapan sebagai berikut: melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Penelitian ini dilakukan pada dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa pada setiap masing-masing sekolah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL PENELITIAN

Penyajian data ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkembang selama dilapangan. Sistematika uraian secara lengkap dari data penelitian ini mengacu pada rumusan masalah. Adapun substansi dari pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut adalah (1) kinerja kebijakan, (2) masalah kebijakan, (3) hasil atau pelaksanaan kebijakan, (4) aksi kebijakan, (5) masa depan kebijakan.

Kinerja Kebijakan Pembelajaran Daring

Kebijakan pembelajaran daring di SMP Muhammadiyah dilaksanakan berdasarkan instruksi kemendikbud, pergub, perwal, diskpora dan juga yayasan. Sedangkan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan pembelajaran berbasis daring di SMP Muhammadiyah menurut KS ditentukan oleh kepala sekolah dengan mengacu pada aturan-aturan dari pemerintah. Sedangkan pelaksanaan kebijakan pembelajaran berbasis daring untuk saat ini sudah berjalan sesuai yang telah diterapkan. dalam penyusunan kebijakan, kepala sekolah dibantu oleh TIM yang terdiri dari para staf dan beberapa unsur guru. Wawancara dengan WKS mengenai kinerja yang sudah disiapkan dan dijalankan dalam mendukung kebijakan pembelajaran daring di SMP Muhammadiyah.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa pembelajaran berbasis daring di SMP Muhammadiyah Yogyakarta sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terbukti pada saat pembelajaran berlangsung para siswa mengikuti dengan tertib, memakai seragam, dan memberikan umpan balik kepada para guru. Berikut ini adalah salah satu foto hasil observasi saat pembelajaran daring berlangsung **Gambar 1** berikut ini.



Gambar 1 Proses Pembelajaran Daring

Dari **Gambar 1** di atas terlihat perangkat yang digunakan dalam pembelajaran berbasis daring adalah dengan HP dan laptop. Para pelajar menunjukkan kemandirian dalam proses pembelajaran berbasis daring, para pelajar melaksanakan kegiatan pembelajaran tanpa dibantu oleh orang lain hanya berkomunikasi dengan guru yang melakukan pembelajaran.

Permasalahan Penerapan Kebijakan Pembelajaran Daring

Permasalahan kebijakan (*policy problems*) merupakan nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Dalam penerapan pembelajaran daring ini memang masih banyak kendala yang dihadapi oleh para guru dan siswa baik dari sisi SDM, materi maupun dari infrastruktur yang ada.

Beberapa kendala yang dihadapi tidak seluruhnya berpengaruh besar terhadap penerapan pembelajaran daring maka beberapa kendala dikategorikan dalam dua hal. Pertama merupakan masalah *78 intern* atau masalah yang muncul dari dalam sekolah sendiri dan masalah yang bersifat *ekstern* atau masalah yang muncul dan ditemukan dari luar sekolah. Masih ada beberapa SDM yang belum familier dengan perkembangan IPTEK, khususnya para guru yang sudah sepuh, atau di akhir masa pensiun. Untuk mengatasi hambatan itu kita berikan pendampingan pada guru-guru yang terkendala. Sehingga kebijakan tetap bisa berjalan dengan baik. Yang kedua faktor *ekstern* atau dari sisi siswa. Dari hasil pendataan wali kelas masih ditemukan beberapa siswa mengalami hambatan dalam jaringan internet, HP tidak *support*, dan alasan tidak ada kuota. Selain itu ada juga beberapa siswa yang memiliki motivasi belajar daring masih rendah.

Hasil Kebijakan Pembelajaran Daring

Hasil kebijakan (*policy outcome*) konsekuensi yang dapat diamati dari aksi kebijakan (Rahmadanita, 2018). Dalam pelaksanaan kebijakan terdapat dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan program pembelajaran daring dalam upaya membentuk pelajar yang mandiri di SMP Muhammadiyah. Dokumen-dokumen hasil kebijakan tersebut berupa dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh pihak sekolah melalui TIM kurikulum dan juga dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh para guru. Dokumen sekolah berupa Kurikulum KTSP, dokumen guru berupa RPP, dokumen proses pembelajaran daring berupa laporan. Selanjutnya adalah mengenai kepemilikan dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran daring. Selain hasil kebijakan yang berupa dokumen, ada juga hasil kebijakan yang berupa capaian. Capaian-capaian ini berupa capaian kompetensi, motivasi, dan capaian karakter pelajar mandiri.

Jika dibandingkan dengan pembelajaran saat normal, maka pembelajaran berbasis daring yang saat ini berlangsung bahwa capaian pembentukan pendidikan karakter berkurang, penilaian tentang sikap juga berkurang. Untuk capaian materi juga berkurang. Berdasarkan data dari masing-masing wali kelas masih ada siswa yang belum bisa mandiri dalam kegiatan pembelajaran berbasis daring. Jika dipersentase sekitar 80% mandiri 20% belum mandiri. Dari hasil observasi diperoleh data bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berbasis daring sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga ketika para guru melaksanakan pembelajaran daring dapat terlaksana dengan lancar.

Aksi Kebijakan Pembelajaran Daring

Aksi kebijakan (*policy action*) merupakan serangkaian tindakan yang dituntun oleh alternative kebijakan yang dirancang untuk mencapai masa depan yang bernilai. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi proses pembelajaran daring yang dilakukan SMP Muhammadiyah aksi kebijakan dapat dipaparkan oleh peneliti mulai dari memetakan dasar hukum pementuan kebijakan pembelajaran berbasis daring, pemetaan kebutuhan sarpras, pembentukan TIM penentu kebijakan pembelajaran daring, proses pelaksanaan kebijakan

pembelajaran daring, sistem pembelajaran berbasis daring, melakukan standarisasi, dan tujuan penerapan kebijakan pembelajaran berbasis daring (Setiyanti et al., 2016).

Aksi pertama yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah dalam penerapan kebijakan pembelajaran berbasis daring yaitu dengan memetakan dasar hukum penentuan kebijakan pembelajaran berbasis daring. Dasar hukum pembelajaran berbasis daring berupa intruksi dari pemerintah pusat, SE, Pergub, Perwal. Aksi yang kedua yaitu pemetaan kebutuhan sarpras sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan pembelajaran berbasis daring di SMP Muhammadiyah. Pemetaan ini dilakukan secara mendetail terkait dengan sarpras, SDM, kondisi peserta didik, platform yang digunakan, dan tujuan penerapan kebijakan pembelajaran berbasis daring.

Aksi ketiga adalah pembentukan tim. Tim dalam menentukan kebijakan pembelajaran berbasis daring ini sekaligus menjadi tim pengembang kurikulum. Aksi keempat adalah proses pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring. Di awal pelaksanaan kebijakan pembelajaran berbasis daring antara guru, orang tua, dan pihak sekolah melakukan komunikasi dan tarik ulur terkait dengan penerapan kebijakan daring. Aksi kelima berkaitan dengan sistem dan *platform* pembelajaran daring yang digunakan. Sistem pembelajaran daring di SMP Muhammadiyah. di rancang sedemikian rupa untuk memudahkan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sistem dibuat mudah untuk diakses perangkat lunak dengan HP, laptop, atau komputer. Aksi enam yaitu melakukan standarisasi media, aplikasi, jangkauan, dan teknis. Standarisasi ini bertujuan untuk memudahkan seluruh peserta didik dalam mengakses pembelajaran. Aksi ketujuh berupa penentuan tujuan penerapan pembelajaran daring di SMP Muhammadiyah. Tujuan utama penerapan kebijakan pembelajaran berbasis daring yaitu menempatkan kesehatan menjadi hal yang harus diutamakan dan dinomorsatukan serta membentuk pelajar mandiri.

Masa Depan dari Kebijakan Pembelajaran Daring

Masa depan kebijakan (*policy future*) merupakan konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk mencapai nilai-nilai. Masa depan dari kebijakan pembelajaran daring merupakan cakupan dari keseluruhan selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung, dalam hal ini dilakukan sebagai pembentuk pelajar mandiri di SMP Muhammadiyah. Hal tersebut dapat terlihat pada perilaku siswa pasca penerapan kebijakan pembelajaran daring, serta harapan ke depan setelah diterapkannya kebijakan pembelajaran daring. Adapun masa depan dalam penerapan kebijakan pembelajaran daring yaitu peserta didik tetap dalam keadaan sehat, memiliki motivasi belajar, memiliki kemandirian dalam belajar. Dari sisi peserta didik menyatakan bahwa motivasi dalam mengikuti pembelajaran berbasis daring tetap terjaga, selain itu peserta didik juga mendapatkan pelayanan pembelajaran yang lengkap. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah, cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, tidak kurang tidak lebih. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi. Sejalan dengan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan pembelajaran daring dalam upaya membentuk pelajar mandiri di SMP Muhammadiyah Yogyakarta telah dijalankan melalui cara yang pertama yaitu dengan cara mengimplementasikan dalam bentuk program.

Program yang dimaksudkan di sini adalah pembelajaran secara daring. Berdasarkan (Machali, 2014) tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *corona virus desias* (covid-19), berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta

tentang kegiatan belajar dari rumah, serta Peraturan Walikota Tentang PPDB Dinas Dikpora Kota Yogyakarta Tahun 2021 tentang Kebijakan Pendidikan Tahun Ajaran Baru 2020-2021 di Tengah Pandemi Covid-19 pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta, serta PP Muhammadiyah (2017) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19, Kepala SMP Muhammadiyah Yogyakarta bersama dengan TIM telah mengeluarkan kebijakan tentang pembelajaran daring pada masa pandemik covid-19. Pengambilan kebijakan tersebut sudah dikatakan tepat, karena kesehatan menjadi faktor yang terutama di atas segalanya (Slameto, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, langkah- langkah dalam membuat kebijakan, dijelaskan bahwa dalam menetapkan sebuah kebijakan harus melalui beberapa tahap yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan penilaian. Perumusan masalah akan menentukan yang menjadi dasar untuk memunculkan kebijakan. Kebijakan penerapan pembelajaran berbasis daring dalam upaya membentuk pelajar mandiri di SMP Muhammadiyah Yogyakarta sudah tepat karena sudah menempatkan kesehatan di atas segalanya, selain itu berbagai Surat Edaran (SE) sudah digunakan sebagai dasar acuan dalam mengambil kebijakan.

Tahap peramalan digunakan sebagai tahap formulasi kebijakan hal ini dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa dari penerapan kebijakan pembelajaran berbasis daring dalam upaya membentuk pelajar mandiri di SMP Muhammadiyah Yogyakarta sudah ada peramalan-peramalan yang akan terjadi dengan penerapan kebijakan tersebut. Adanya penurunan karakter sikap, adanya kendala jaringan, adanya kendala kuota, adanya penurunan motivasi belajar jarak jauh merupakan beberapa peramalan yang ditemukan dalam penelitian ini.

Tahap berikutnya adalah tahap rekomendasi. Rekomendasi akan membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa datang telah diramalkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ramalan-ramalan yang telah menjadi fakta dan terjadi yaitu bahwa setelah penerapan kebijakan pembelajaran berbasis daring dalam upaya membentuk pelajar mandiri di SMP Muhammadiyah Yogyakarta berlangsung. Karakter peserta didik menurun, adanya kendala jaringan, adanya kendala kuota, adanya penurunan motivasi semuanya terjadi. Beberapa rekomendasi untuk mengatasi hal tersebut juga sudah dilakukan antara lain, memanfaatkan guru BK dan wali kelas untuk melakukan *home visit*, guru kunjung, sekolah memberikan bantuan pulsa kepada peserta didik, bahkan sampai melaksanakan belajar secara langsung dengan proses ketat bagi beberapa peserta didik yang betul-betul terkendala.

Tahap pemantauan (*monitoring*) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemantauan dari penerapan kebijakan pembelajaran berbasis daring dalam upaya membentuk pelajar mandiri di SMP Muhammadiyah Yogyakarta telah dilakukan oleh berbagai pihak yaitu dari pihak sekolah dan pihak orang tua. Pemantauan ini juga sejalan dengan perkembangan intruksi dari pemerintah pusat, wilayah, daerah terkait dengan perubahan situasi kondisi pandemi. Jika terjadi perkembangan intruksi maka kebijakan yang diterapkan juga akan disesuaikan.

Tahap evaluasi, tahap ini membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar

dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap evaluasi menggambarkan bahwa dari para staf, wali kelas dan guru menyampaikan bahwa penerapan kebijakan pembelajaran berbasis daring dalam upaya membentuk pelajar mandiri di SMP Muhammadiyah Yogyakarta tercatat bahwa 80% para siswa mampu menjadi pelajar mandiri, sedangkan 20% masih memerlukan bimbingan secara intensif. Mandiri di sini sesuai dengan hasil penelitian bahwa siswa sadar dan mampu memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri tanpa ada ketergantungan dari orang lain.

Analisis kebijakan akan menghasilkan informasi tentang kinerja kebijakan, masalah kebijakan, hasil kebijakan, aksi kebijakan, dan masa depan kebijakan. Masing-masing informasi dari hasil penerapan kebijakan pembelajaran berbasis daring dalam upaya membentuk pelajar mandiri

3.2 PEMBAHASAN

Kinerja Kebijakan

Kinerja kebijakan (*policy performance*) merupakan derajat pencapaian nilai-nilai dari hasil kebijakan yang sudah diterapkan. Menurut peneliti bahwa kinerja kebijakan dari penerapan kebijakan pembelajaran berbasis daring dalam upaya membentuk pelajar mandiri di SMP Muhammadiyah Yogyakarta sudah terealisasi dibuktikan dengan, kurikulum yang digunakan untuk pembelajaran daring sudah disesuaikan, pengaturan jadwal sistem dan platform yang digunakan dalam pembelajaran daring sudah ada dan berjalan yaitu dengan menggunakan *WA, GC, Geschool, Gmeet, Zoom*. Para peserta didik dan orang tua juga sudah sepakat dan setuju dengan penerapan kebijakan yang sudah dijalankan oleh SMP Muhammadiyah Yogyakarta. *WhatsApp* bisa ideal untuk siswa karena biayanya rendah dan memungkinkan siswa dan guru untuk berkomunikasi, mengobrol, berbagi ide, dan mengirim pesan *audio* dan *video* sesering yang mereka inginkan setiap saat sepanjang hari. Meskipun demikian, peluang komunikasi dan jaringan disediakan oleh alat *WhatsApp*, dan siswa merasa mudah untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam sesi kelas.

Masalah Kebijakan

Masalah kebijakan (*policy problem*) merupakan nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Kinerja dalam Penerapan Kebijakan Pembelajaran Berbasis Daring dalam Upaya Membentuk Pelajar Mandiri di SMP Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan hasil penelitian yaitu bahwa masih ada beberapa guru yang belum mahir/mampu dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Kemudian masih ada beberapa peserta didik yang terkendala dengan jaringan internet karena posisi letak rumah yang terpencil atau jauh dari sinyal. Ada juga faktor ketidak mampuan peserta didik dalam pemilikan perangkat, satu perangkat digunakan Bersama-sama dengan saudaranya (Pawero, 2021).

Faktor ekonomi (tidak memiliki kuota data) juga masuk sebagai salah satu masalah yang ditemukan dalam penerapan kebijakan ini. Penurunan karakter peserta didik dan turunnya capaian kompetensi juga menjadi masalah dalam penerapan kebijakan ini. Penurunan motivasi belajar akibat rasa jenuh dan terlalu banyak beban tugas termasuk bagian dari masalah penerapan kebijakan. (Akala, 2021).

Dari masalah-masalah yang ditemukan tersebut, Kepala SMP Muhammadiyah Yogyakarta selaku pemimpin dan penanggung jawab sudah memberikan tindak lanjut. Guru

yang belum mampu melaksanakan pembelajaran daring dengan lancar diberikan pembinaan, pendampingan, dan pemberian fasilitator dalam hal IT. Beberapa siswa yang terkendala jaringan didata oleh wali kelas, kemudian difasilitasi untuk belajar di sekolah dengan prokes ketat. Pemberian bantuan pulsa dari sekolah untuk peserta didik juga dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan dan fasilitas peserta didik yang masih terkendala karena tidak ada kuota internet. Sementara terkait dengan penurunan karakter pada peserta didik, terjadi karena banyak faktor. Kepala sekolah menyampaikan bahwa karakter peserta didik akan tetap tumbuh dan berkembang, baik karakter disiplin, sopan, santun, rajin, kerja keras yang bisa mengendalikan pada masa daring ini adalah orang tua.

Orang tua berperan ganda menjadi sosok guru juga sosok orang tua, sehingga karakter peserta didik ini harus selalu dipantau dan dibiasakan setiap hari dengan pelibatan orang tua. Turunnya motivasi dan capaian kompetensi memang tidak bisa dielakkan oleh semua pihak. Berdasarkan hasil pemetaan dalam pemerolehan nilai ASPD didapat data bahwa seluruh peserta didik se-provinsi Yogyakarta hanya mampu menyerap 60% dari materi yang diberikan. Hal ini membuktikan bahwa proses pembelajaran daring yang diterapkan saat ini mengakibatkan degradasi kompetensi peserta didik dibandingkan saat ada tatap muka, namun harus dijunjung tinggi bahwa kesehatan siswa adalah di atas segalanya.

Hasil Kebijakan

Dalam penelitian ini diperoleh bahwa konsekuensi-konsekuensi yang dapat teramati dari hasil kebijakan penerapan pembelajaran daring dalam upaya membentuk pelajar mandiri di SMP Muhammadiyah Yogyakarta antara lain bahwa system pembelajaran daring sudah terlaksana, kebijakan yang ditetapkan oleh kepala sekolah sudah mengacu kepada berbagai Surat Edaran (SE) baik dari kementerian pusat sampai daerah, kemandirian peserta didik dalam memenuhi kebutuhan belajarnya melalui sistem daring sudah terbentuk meskipun belum secara keseluruhan dikatakan mandiri. Selain itu hasil kebijakan ini ditunjukkan dengan bentuk dokumen-dokumen sebagai persiapan, proses, dan hasil pelaksanaan kebijakan. Dokumen yang ada berupa KTSP, RPP, pemetaan KI KD, LKPD, dan laporan BDR. Dalam upaya membentuk kemandirian belajar peserta didik, guru-guru bekerja sama dengan guru BK dan wali kelas serta orang tua untuk selalu mengingatkan kepada peserta didik bahwa belajar dengan sistem daring merupakan cara dan kewajiban yang harus dijalankan untuk saat pandemi. Sehingga kemandirian dalam memenuhi kebutuhan belajar dirinya diharapkan dapat terbentuk dengan baik.

Aksi Kebijakan

Serangkaian tindakan yang dituntun oleh alternative kebijakan yang dirancang untuk mencapai masa depan yang bernilai. Dalam penerapan kebijakan pembelajaran berbasis daring dalam upaya membentuk pelajar mandiri di SMP Muhammadiyah Yogyakarta aksi kebijakan jelas dipengaruhi oleh kondisi masa pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir. Aksi kebijakan dimulai dari memetakan dasar hukum pementuan kebijakan pembelajaran berbasis daring, pemetaan kebutuhan sarpras, pembentukan TIM penentu kebijakan pembelajaran daring, proses pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring, sistem pembelajaran berbasis daring, melakukan standarisasi, dan tujuan penerapan kebijakan pembelajaran berbasis daring. Selain itu intruksi-intruksi terbaru dari pemerintah pusat dan diturunkan ke wilayah, daerah sampai pada sekolah merupakan bentuk penuntun bagi kepala sekolah untuk senantiasa melakukan kebijakan. Sehingga rambu-rambu perubahan kebijakan dan penetapan kebijakan selalu didasari oleh aturan dari pemerintah dan Yayasan.

Masa Depan Kebijakan Masa Depan Kebijakan (*Policy Future*)

Konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk mencapai nilai-nilai. Dalam penerapan kebijakan pembelajaran berbasis daring dalam upaya membentuk pelajar mandiri di SMP Muhammadiyah Yogyakarta, masa depan kebijakan berupa pelayanan-pelayanan yang muncul dan harus diberikan baik kepada guru, peserta didik, atau orang tua peserta didik. Kepala sekolah memberikan jaminan pelayanan pembelajaran secara daring, kepala sekolah memberikan layanan pendampingan pada guru-guru, kepala sekolah memberikan pengaturan *work from home* dan *work from office* dalam menjalankan pembelajaran daring. Pemberian kuota kepada guru dan siswa serta layanan kunjung menjadi bentuk konsekuensi yang telah di jalankan di SMP Muhammadiyah Yogyakarta dari serangkaian hasil analisis kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pembelajaran berbasis daring dalam upaya membentuk pelajar mandiri di SMP Muhammadiyah Yogyakarta sudah berjalan dengan baik.

Kemandirian pelajar SMP Muhammadiyah Yogyakarta Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dari keseluruhan pelajar di SMP Muhammadiyah Yogyakarta masih terdapat sekitar 20 % pelajar yang belum bisa bersikap mandiri dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini didukung dari pernyataan yang di sampaikan oleh masing-masing guru wali kelas dari kelas VII sampai kelas IX dan juga dari pernyataan para peserta didik. Masing masing guru menyatakan bahwa rata-rata 20% atau sekitar 4-5 siswa dari 32 siswa perkelas setiap harinya harus selalu diingatkan untuk melaksanakan pembelajaran

4. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh SMP Muhammadiyah berjalan dengan baik dengan cara mempersiapkan dan menjalankan proses pembelajaran dengan membuat perencanaan, mengorganisir, dan mengevaluasi semua aktivitas yang dilakukan. Kerjasama dengan seluruh warga sekolah (kepala sekolah, wakasek, guru, orang tua siswa) dan juga yayasan yang menaungi sekolah tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akala, D. B. M. (2021). Revisiting education reform in Kenya: A case of competency based curriculum (CBC). *Social Sciences & Humanities Open*, 3(1), 100107.
- Firman, & Rahman, S. R. (2020). Pembelajaran online di tengah pandemi covid-19. *IJEST: Indonesia Journal of Educational Science*, 2(2), 81-89.
- Hanafi, Y., Taufiq, A., Saefi, M., Ikhsan, M. A., Diyana, T. N., Thoriquttyas, T., & Anam, F. K. (2021). The new identity of Indonesian Islamic boarding schools in the “new normal”: The education leadership response to COVID-19. *Heliyon*, 7(3), e06549.
- Kurniaman, O., & Noviana, E. (2017). Penerapan kurikulum 2013 dalam meningkatkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(2), 389-396.
- Machali, I. (2014). Kebijakan perubahan kurikulum 2013 dalam menyongsong Indonesia emas tahun 2045. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 71-94.
- Nurdin, A., & Samad, S. A. A. (2018). Dynamics of Islamic education in the land of Bugis: Growth, development and typology Pesantren in Bone. *IOP Conference Series: Earth and*

Environmental Science, 175(1), 012158.

- Pabbajah, M., Said, N. M., Faisal, Taufiq Hidayat Pabbajah, M., Jubba, H., & Juhansar. (2020). Deauthorization of the religious leader role in countering covid- 19: Perceptions and responses of muslim societies on the ulama's policies in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 262–273.
- Pawero, A. M. D. (2021). Arah baru perencanaan pendidikan dan implikasinya terhadap kebijakan pendidikan. *Dirasah (Jurnal Study Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam)*, 4(1), 16-32.
- Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2018). Implementasi kebijakan smart government dalam rangka mewujudkan smart city di kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 81-106.
- Setiyanti, A. A., Palekahelu, D. T., & Sedyono, E. (2016). Perencanaan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung rencana strategis di sekolah menengah. *Jurnal Buana Informatika*, 7(2), 95–104.
- Slameto, S. (2015). Rasional dan elemen perubahan kurikulum 2013. *Scholaria : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(1), 1-9.